



BELUM APA-APA!

KINERJA PEMDA MELAKSANAKAN
KORSUP MINERBA





Latar Belakang

Korsup Minerba diinisiasi oleh KPK pada tanggal 6 Februari 2014, dengan tujuan untuk pembenahan tata kelola di sektor pertambangan mineral dan batubara.

Inisiasi Korsup Minerba tersebut terjadi mengingat berbagai masalah tata kelola pertambangan, diantaranya termasuk belum selesainya penataan perizinan, tidak adanya upaya sistematis untuk meningkatkan *domestic market obligation*, dan kerugian keuangan negara akibat tidak optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban keuangannya.

Pada Tahap Pertama, Korsup Minerba disepakati dilaksanakan oleh 12 Pemerintah Daerah.

Target Dan Ukuran Kinerja Korsup Minerba





Penilaian Kinerja

PARTISIPASI CIVIL SOCIETY

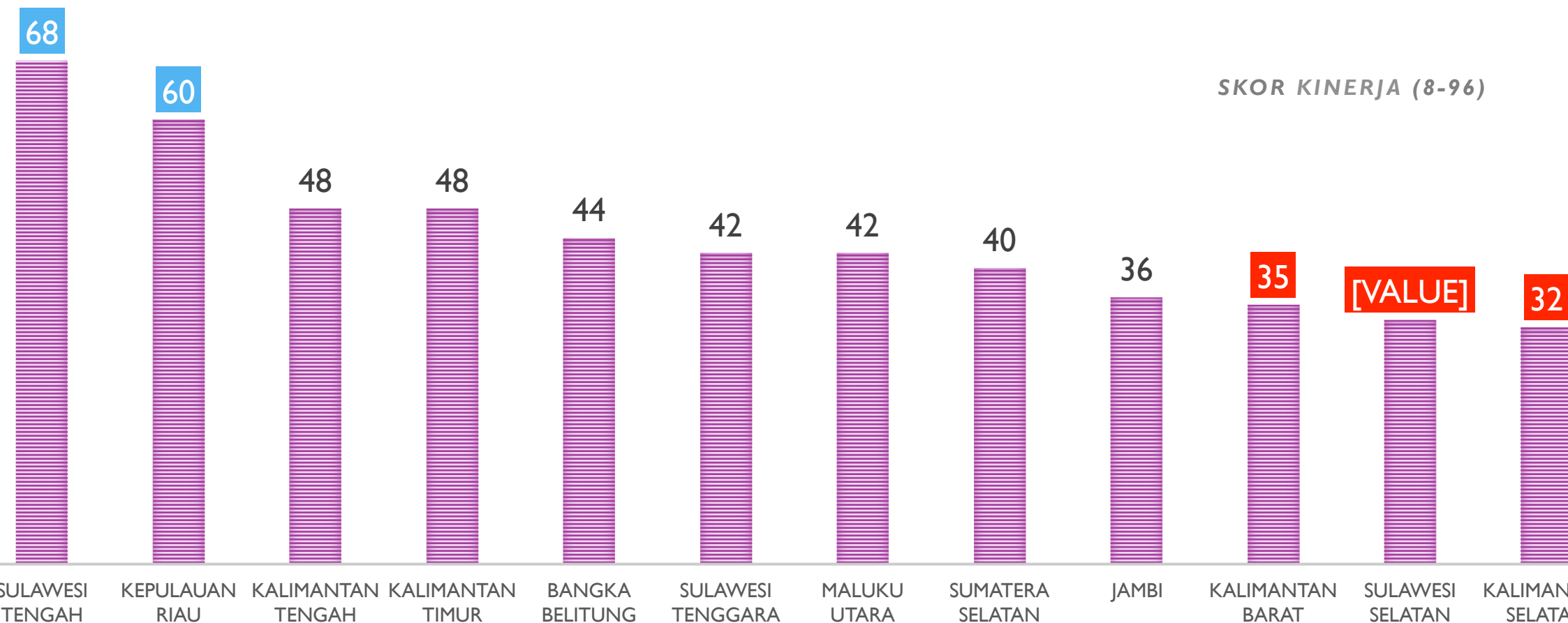
Penilaian kinerja Korsup Minerba ini dilakukan oleh **Koalisi Anti Mafia Tambang**, termasuk diantaranya, Walhi, Jatam, Auriga, YLBHI, SAINS serta CSO di daerah, termasuk Sampan.

Bersama jejaring CSO di daerah, Koalisi terlibat dalam koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

MENGUKUR KOMITMEN DAN INTEGRITAS

Tujuan Indeksing atau Penilaian ini adalah untuk melihat *komitmen, keseriusan, serta kemampuan Pemerintah Daerah* untuk melaksanakan pembenahan tatakelola usaha pertambangan yang telah disepakainya sebelumnya.

Indeks Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Korsup Minerba



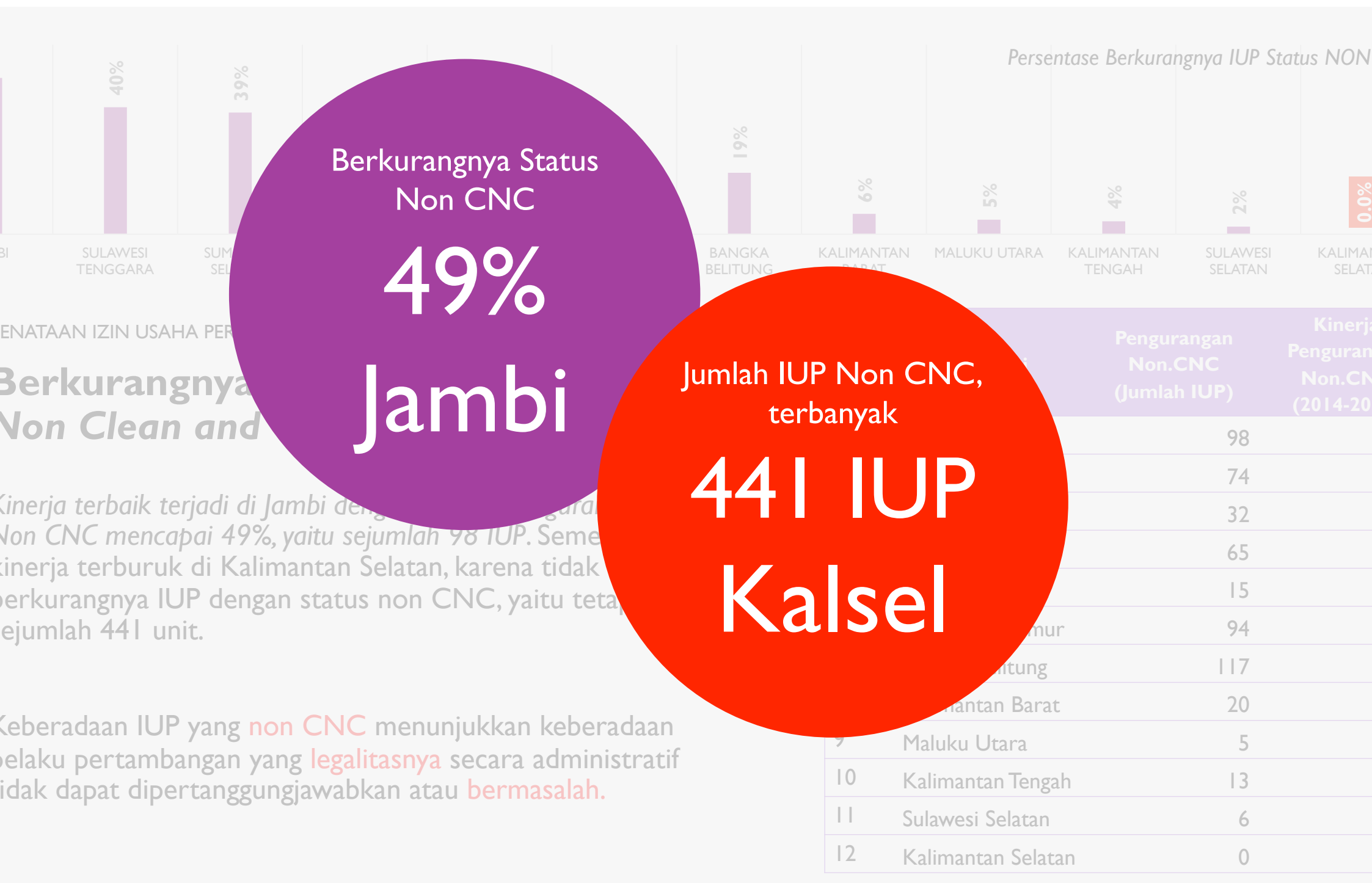
Tabulasi Indeks Kinerja Pemerintah Daerah Pada Korsup Minerba Di 12 Propinsi

Propinsi	Kinerja Penataan Izin			Pemenuhan Kewajiban Keuangan	Pengawasan Produksi	Pengawasan Pengelolaan	Pengawasan Penjualan	Skor Kinerja Pemda
	Pengurangan IUP Non-cnc	Pencabutan/ Tidak Diperpanjang	Penurunan Tumpang Tindih HK					
JAWA TENGAH	9	12	12	4	8	12	11	68
KEPULAUAN RIAU	8	10	1	10	10	9	12	60
DAERAH ALIRAN Sungai SIANGKANG	3	2	9	3	12	9	10	48
DAERAH ALIRAN Sungai BAWANG	7	8	1	9	8	8	7	48
DAERAH ALIRAN Sungai BAWANG	6	4	6	7	11	1	9	44
JAWA TENGGARA	11	5	1	1	7	9	8	42
DAERAH ALIRAN Sungai BAWANG	4	6	7	7	6	6	6	42
SUMATERA SELATAN	10	11	1	5	4	5	4	40
DAERAH ALIRAN Sungai BAWANG	12	9	10	2	1	1	1	36
DAERAH ALIRAN Sungai BAWANG	5	7	1	12	3	4	3	35
JAWA SELATAN	2	3	11	6	2	7	2	33
DAERAH ALIRAN Sungai BAWANG	1	1	8	11	5	1	5	32

Kinerja Pemenuhan Target Korsup Minerba



Komponen Penataan Perizinan



Perkurangnya IUP Dengan Status *Non Clean* a

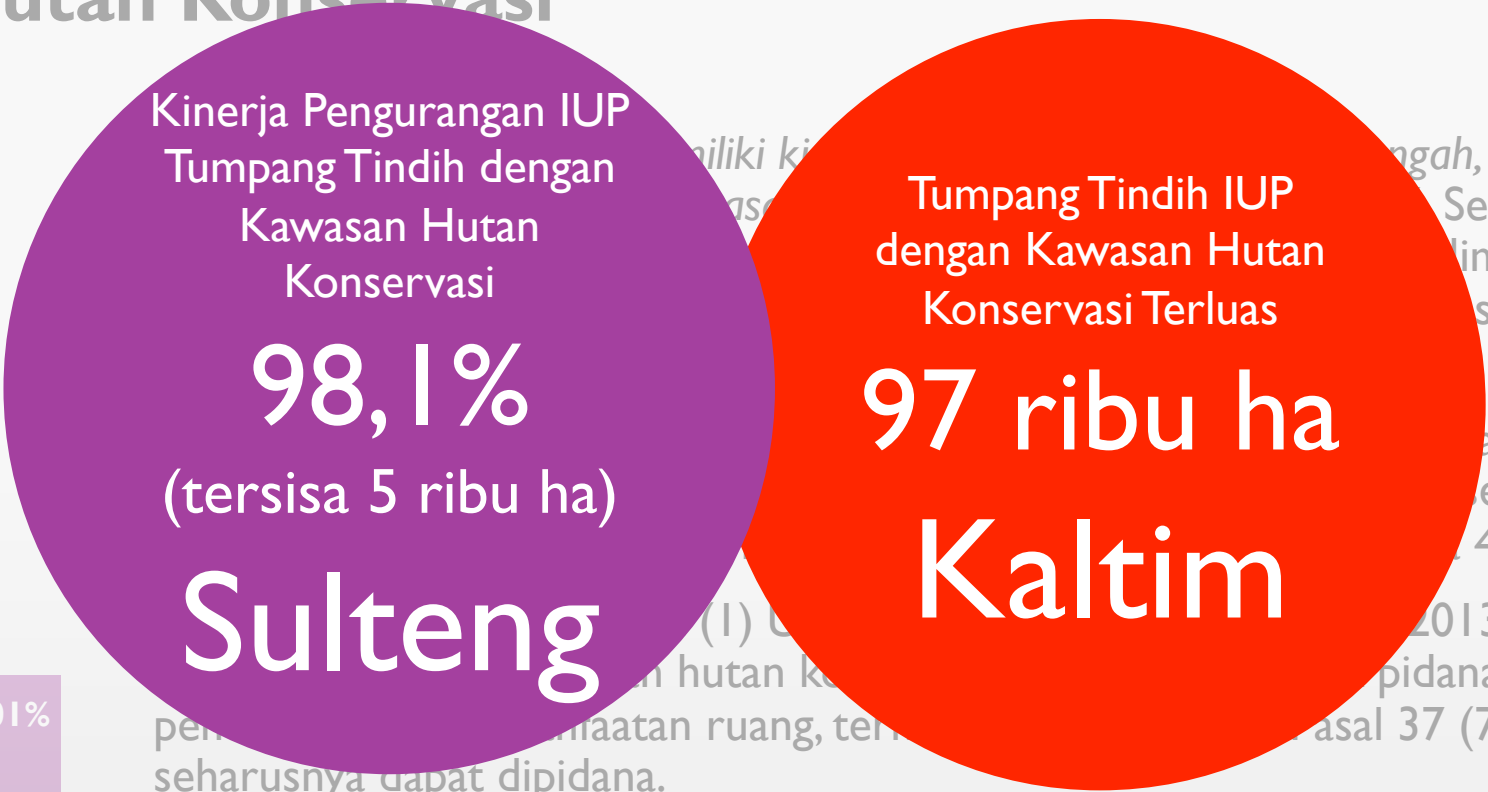
Tabel Persentase Kinerja Pengur

Provinsi	IUP Saat Korsup (2014)			IUP Setelah Korsup		
	Total	NON CNC	CNC	Total	NON CNC	
JAMBI	398	198	200	264	100	
SULAWESI TENGGARA	498	184	314	454	110	
SUMATERA SELATAN	359	83	276	291	51	
SULAWESI TENGAH	437	199	238	349	134	
KEPULAUAN RIAU	161	47	114	127	32	
KALIMANTAN TIMUR	1.443	450	993	1.360	356	
BANGKA BELITUNG	1.109	601	508	1.109	484	
KALIMANTAN BARAT	682	312	370	664	292	
MALUKU UTARA	286	108	227	313	103	
KALIMANTAN TENGAH	866	311	555	867	298	
SULAWESI SELATAN	414	242	172	415	236	
KALIMANTAN SELATAN	845	441	404	835	441	

DESAKAN KOALISI ANTI-MAFIA PERTAMBANG

1. CABUT SELURUH IUP NON CNC.
2. PASTIKAN KEWAJIBAN KEUANGAN TERPENUHI SETELAH DICABUT.
3. ANTISIPASI UPAYA PERLAWANAN HUKUM DAN PEMEGANG IZIN YANG DICABUT.
4. KELUARKAN DAFTAR BLACK LIST PELAKU USAHA PERTAMBANGAN (PEMILIK, PENGURUS, DAN GRUP USAHA).

Penertiban IUP tumpang tindih dengan kawasan Hutan Konservasi



Penertiban IUP tumpang tindih dengan kawasan Hutan Konservasi

Kabupaten/Kota	IUP Dalam Hutan Konservasi (2014)	IUP Dalam Hutan Konservasi (2015)	P
SULAWESI TENGAH	299.666,00	5.697,08	
SULAWESI SELATAN	17.159,11	5.146,50	
AMB	7.401,17	6.300,22	
KALIMANTAN TENGAH	8.987,70	8.315,28	
KALIMANTAN SELATAN	12.422,60	12.336,79	
MALUKU UTARA	8.110,06	8.055,79	
BANGKA BELITUNG	3.268,49	3.246,65	
KEPULAUAN RIAU	-	133,60	
SUMATERA SELATAN	932,64	6.292,67	
KALIMANTAN BARAT	101,31	2.531,74	
KALIMANTAN TIMUR	4.299,96	97.756,13	
SULAWESI TENGGARA	2.224,39	2.227,67	

Tabel pengurangan luasan areal tumpang tindih antara konsesi IUP dan kawasan Hutan Konservasi

DESAKAN KOALISI ANTI-MAFIA PERTAMBANGAN

1. APARAT PENEGAK HUKUM
MENINDAK IUP YANG
BEROPERASI DI DALAM
KAWASAN HUTAN
KONSERVASI
2. CABUT SELURUH IUP DI
DALAM KAWASAN HUTAN
KONSERVASI

Kinerja Pemenuhan Target Korsup Minerba

2

Komponen Pemenuhan Kewajiban Keuangan

Pembayaran Kewajiban Keuangan Luran Produksi (Royalty)

Kinerja terbaik terjadi di 3 (tiga) provinsi, dengan jumlah piutang negara royalti terendah pada tahun 2014 diantaranya Kalimantan Selatan 231 juta, Kepulauan Riau sebesar 4,6 miliar dan Bangka Belitung sebesar 11,1 miliar. Sedangkan provinsi dengan piutang negara tertinggi adalah Kalimantan Timur sebesar 82,6 miliar rupiah.

Secara umum, sebagian besar piutang negara atas lura Produksi Mineral dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami peningkatan, kecuali Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.



PEMENUHAN KEWAJIBAN KEUANGAN

Pembayaran Kewajiban Keuangan Iuran Produksi (*Royalty*)

Provinsi	Piutang Negara Tahun 2013 (Rp)
KALIMANTAN SELATAN	17,886,6
KEPULAUAN RIAU	9,425,0
BANGKA BELITUNG	5,130,3
KALIMANTAN BARAT	95,539,1
SULAWESI SELATAN	9,510,0
JAMBI	16,827,5
MALUKU UTARA	15,792,5
SULAWESI TENGGARA	15,791,8
SULAWESI TENGAH	32,691,0
SUMATERA SELATAN	48,473,4
KALIMANTAN TENGAH	57,962,7
KALIMANTAN TIMUR	92,175,4

**Tabel. Jumlah Piutang negara dari Iuran Tetap usaha pert
tahun 2013 dan 2014**

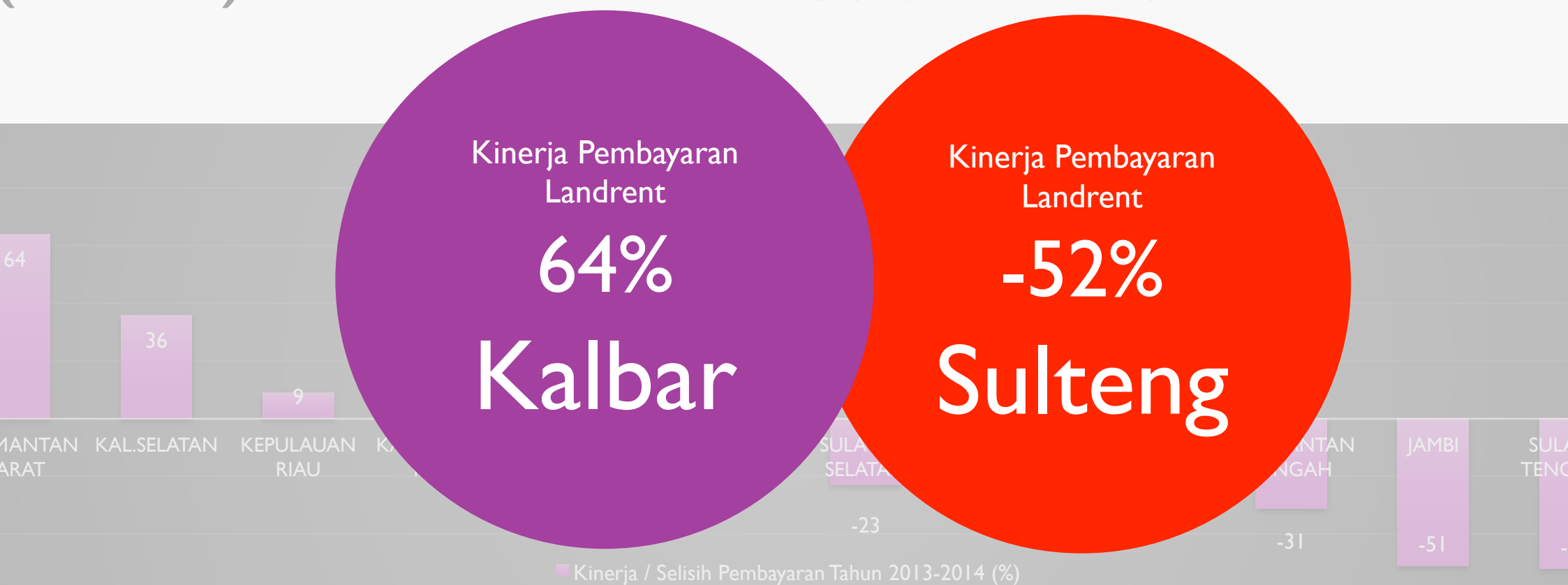
DESAKAN KOALISI ANTI-MAFIA TAMBANG

1. VERIFIKASI DATA PRODUK
UNTUK MENGUJI
KEBENARAN KEWAJIBAN
KEUANGAN
2. TAGIH SELURUH
TUNGGAKAN PIUTANG
NEGARA
3. PENGHENTIAN SEMENTA
PRODUKSI SEBELUM
PIUTANG DIBAYARKAN

Pembayaran Kewajiban Keuangan Iuran Tetap (Landrent)

Kinerja terbaik dalam pemungutan iuran tetap terjadi di Kalimantan Barat dengan persentase mencapai 64%, sementara kinerja terburuk terjadi di 2 (dua) provinsi yaitu Sulawesi Tenggara dan Jambi.

Jika diperhatikan, hampir seluruh pemenuhan kewajiban *landrent* justru menurun luar biasa. Hanya 3 provinsi diantaranya yang memiliki kinerja positif.



Pembayaran Kewajiban Keuangan Iuran Tetap (Landrent)

Propinsi	Pembayaran Landrent Tahun 2013 (Rp).	Pembayaran (%) 2013	Pemb Landrer 2014
ALIMANTAN BARAT	35.479.239.848	27	112
ALIMANTAN SELATAN	31.204.848.994	64	24
EPULAUAN RIAU	5.891.495.236	38	4
ALIMANTAN TIMUR	103.732.497.594	53	57
ANGKA BELITUNG	41.715.598.940	89	29
ALUKU UTARA	17.441.250.649	52	11
ULAWESI SELATAN	4.793.027.818	34	1
UMATERA SELATAN	28.401.423.380	37	7
ULAWESI TENGAH	10.702.534.788	25	
ALIMANTAN TENGAH	56.872.824.376	50	18
AMBI	8.828.943.200	34	-2
ULAWESI TENGGARA	19.403.341.651	55	

Tabulasi persentase selisih pembayaran landrent tahun 2013 dan tahun 2014

DESAKAN KOALISI ANTI-MAFIA TAMBANG

1. TAGIH SELURUH
TUNGGAKAN PIUTANG
NEGARA
2. PENGHENTIAN SEMEN
PRODUKSI SEBELUM
PIUTANG DIBAYARKAN

3

Kinerja Pemenuhan Target Korsup Minerba

Komponen Pengawasan Produksi

Obyek yang dinilai:

- Konsolidasi data laporan dan melaporkan ke pusat (50%)
- Ketersediaan dokumen pendukung laporan ke pusat (10%)
- Proses pengawasan atau verifikasi laporan perusahaan (20%)
- Penegakan atau tindak lanjut hasil verifikasi (20%)

Kinerja Pengawasan
Produksi

35,7%

Kalteng

Kinerja Pengawasan
Produksi

0%

Jambi

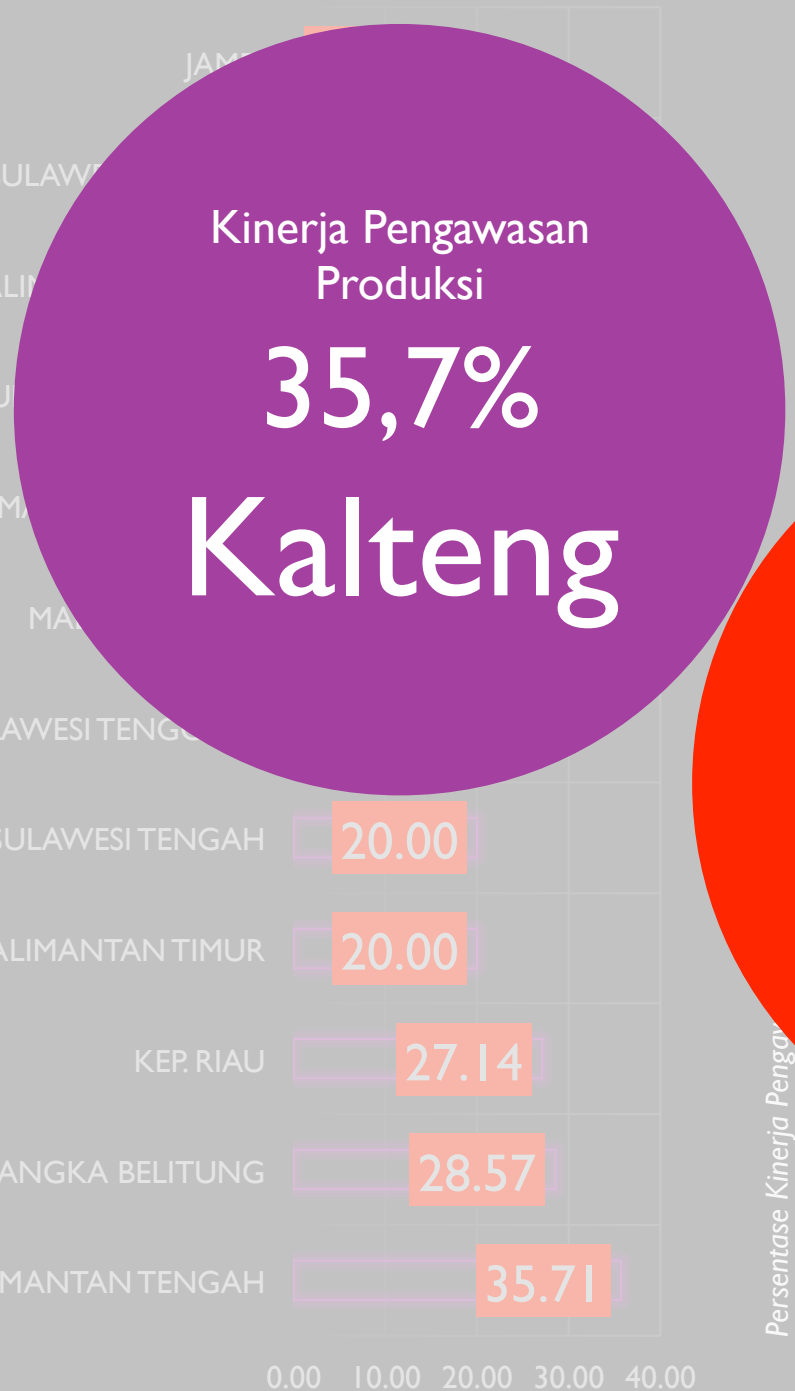
PENGAWASAN PRODUKSI IZIN USAH APERTAMBANGAN

Dilaksanakannya Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Produk Pertambangan

terjadi di Kalimantan Tengah, hingga mencapai 35,7%. Sementara itu, yang terburuk terjadi di Jambi dan Sulawesi Tengah dengan angka 0% hingga 2,5%. Dengan angka 0% artinya daerah tersebut sama sekali tidak melakukan pengawasan.

Pengawasan produksi tersebut dinilai dari data produksi dalam laporan, dokumen pengawasan itu sendiri, penjelasan mengenai pengawasan, serta penegakan hukum atau pemberian sanksi sebagai tindak lanjut.

Dengan angka maksimal hanya 35%, dapat diasumsikan bahwa sebagian besar produksi hasil tambang oleh IUP tidak pernah diverifikasi oleh pemerintah.



Dilaksanakannya Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Produksi Usaha Pertambangan

Tabel Persentase Penilaian Kelengkapan data Pengawasan Produksi di 12 propinsi

Provinsi	Total Kab.	Jumlah Kab. Ber-IUP	Jumlah Kab. Lapor Pengawasan	Jumlah Kab.Tidak Lapor Pengawasan Produksi	Kinerja pengawasan Produksi (%)
KALIMANTAN TENGAH	15	15	6	9	35,71
BANGKA BELITUNG	8	8	2	6	28,57
KEPULAUAN RIAU	9	7	5	2	27,14
SULAWESI TENGAH	12	11	9	2	20
KALIMANTAN TIMUR	15	12	3	9	20
SULAWESI TENGGARA	15	13	4	9	11,43
MALUKU UTARA	10	9	3	6	8,89
KALIMANTAN SELATAN	14	8	2	6	6,15
SUMATERA SELATAN	16	13	2	11	5,33
KALIMANTAN BARAT	13	13	2	11	5
SULAWESI SELATAN	24	16	3	13	2,5
PAMBI	12	8	0	8	0

Dilaksanakannya Pengawasan Dan Penegak Terhadap Produksi Usaha Pertambangan

Provinsi	Kab.Tidak Lapor Pengawa
NTAN TENGAH	Kapuas Hulu, Barito Utara, Katingan, Seruyan, Sukamara, Gunung Mas, Pulang
A BELITUNG	Bangka, Belitung, Bangka Selatan, Bangka Barat, Kota Pangkalpinang
UAN RIAU	Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna
SI TENGAH	Morowali, Poso, Banggai Kepulauan
NTAN TIMUR	Kutai Kartanegara, Berau, Bulungan, Kota Samarinda, Kota Tarakan, Nunukan, Bontang
SI TENGGARA	Konawe, Buton, Bombana, Kolaka Timur, Muna, Konawe Selatan, Wakatobi, B
U UTARA	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Pulau Morotai, Halmahera Utara, Kota
NTAN SELATAN	Tanah Laut Banjar, Tabalong, Kota Banjarmasin, Barito Kuala, Tapin, Tanah Bun Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Banjarbaru
RA SELATAN	Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Lahat Ogan Komering Ilir, Musirawas, Ka Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang
NTAN BARAT	Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak, Sekadau Melawi
SI SELATAN	Bone, Barru, Soppeng, Kepulauan Selayar Jeneponto, Sinjai, Bulukumba, Taka Sidenreng, Rappang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Kota Makassar, Kota Pare
	Merangin, Sorolangun, Batang Hari, Muaro Jambi Tanjung Jabung Barat Tanj

DESAKAN KOALISI ANTI-MAFIA TAMBANG

1. REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP SELURUH DATA PRODUKSI
2. SANKSI KEPADA KABUPATEN YANG TIDAK MELAKSANAKAN PENGAWASAN PRODUKSI
3. PERBANYAK INSPEKTUR TAMBANG DI PEMDA

4

Kinerja Pemenuhan Target Korsup Minerba

Komponen Pengawasan Pengolahan

Obyek yang dinilai:

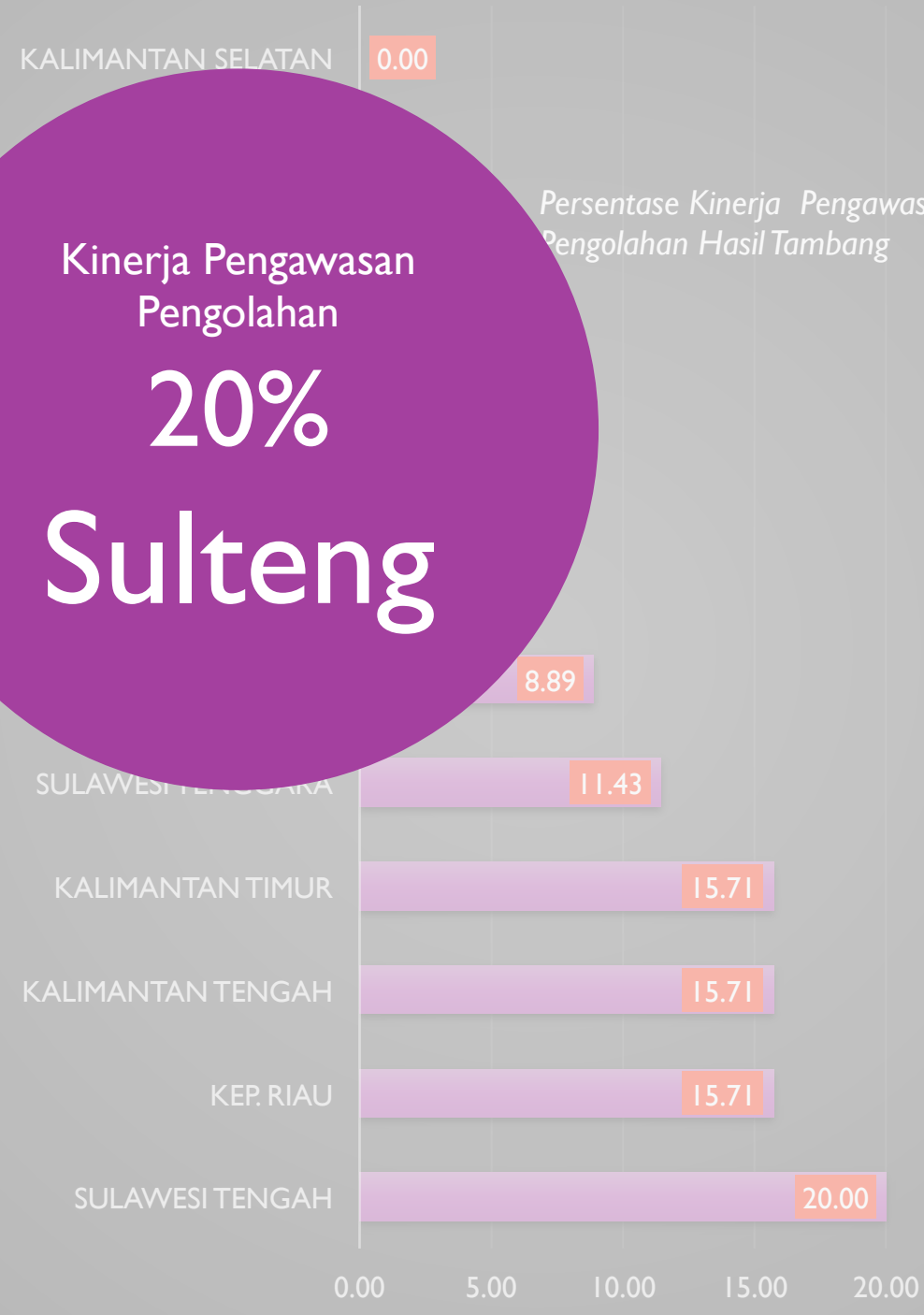
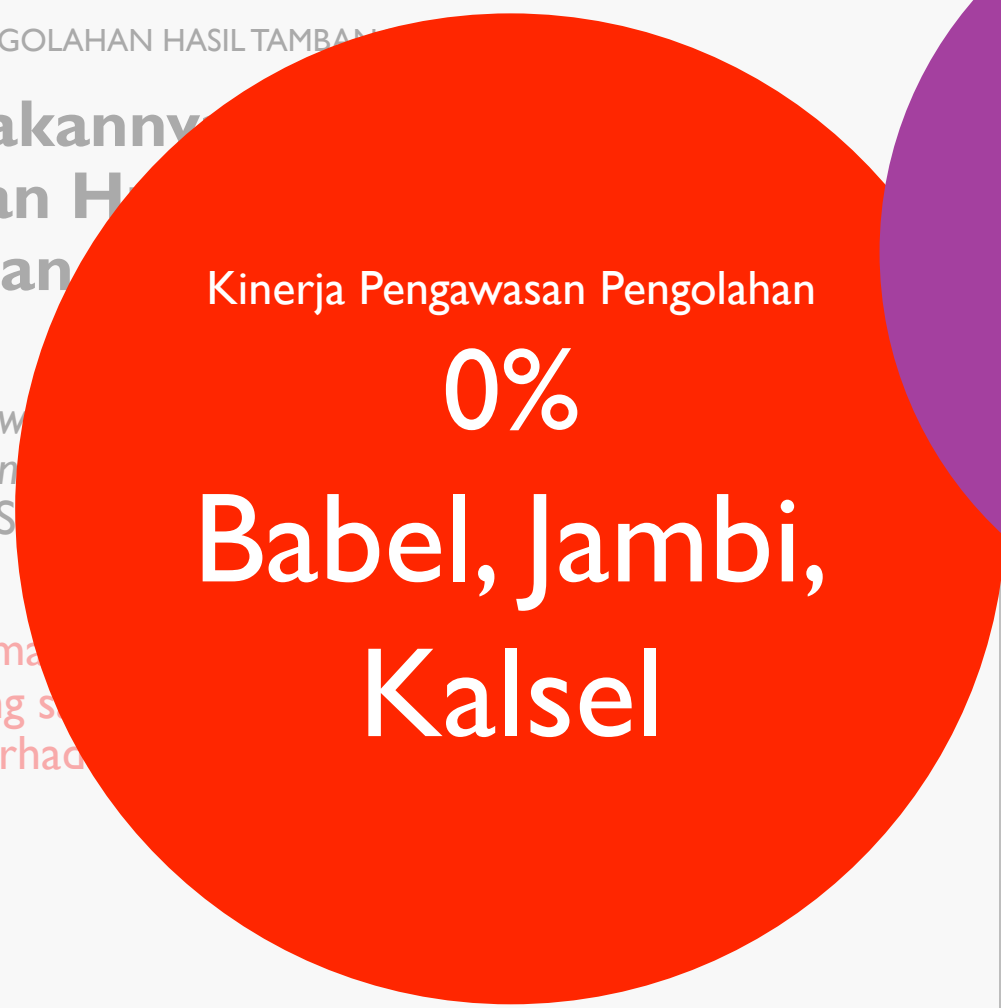
- Konsolidasi data laporan dan melaporkan ke pusat (50%)
- Ketersediaan dokumen pendukung laporan ke pusat (10%)
- Proses pengawasan atau verifikasi laporan perusahaan (20%)
- Penegakan atau tindak lanjut hasil verifikasi (20%)

INGAWASAN PENGOLAHAN HASIL TAMBAH

ilaksanakanny
enegakan H
engolahan

giatan pengaw
ngan kinerja m
Kalimantan S
ai 0%.

engan maksima
upaten yang s
ngawasan terhad



Dilaksanakannya Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Pengolahan Hasil Usaha Pertambangan

Provinsi	Total Kab.	Jumlah Kab. Ber-IUP	Jumlah Kab. Lapor Pengawasan	Jumlah Kab. Tidak Lapor Pengawasan Pengolahan	Kinerja Pengawasan Pengolahan (%)
SULAWESI TENGAH	12	11	9	2	20
KALIMANTAN TENGAH	15	15	5	10	15,71
SULAWESI TENGGARA	9	7	4	3	15,71
KEPULAUAN RIAU	15	12	3	9	15,71
KALIMANTAN TIMUR	15	13	4	9	11,43
SULAWESI SELATAN	10	9	3	6	8,89
MALUKU UTARA	16	13	2	11	5,33
SUMATERA SELATAN	13	13	2	11	5
KALIMANTAN BARAT	24	16	3	13	2,5
BANGKA BELITUNG	8	8	0	8	0
JAMBI	12	8	0	8	0
KALIMANTAN SELATAN	14	8	0	8	0

Tabel Penilaian Kinerja Pengawasan Pengelolaan Tambang di 12 provinsi

Dilaksanakannya Pengawasan Dan Penegakan Terhadap Pengolahan Hasil Usaha Pertamban

Provinsi	Kabupaten Yang Tidak Lapor Pengawa
TENGAH	Morowali, Poso, Banggai Kepulauan
TANTENGAH	Kapuas Hulu Barito Utara Katingan Seruyan Sukamara, Gunung Mas
TENGGARA	Konawe, Buton, Bombana, Kolaka Timur, Muna, Konawe Selatan, Wakato
AN RIAU	Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas
TAN TIMUR	Kutai Kartanegara, Berau, Bulungan, Kota Samarinda, Kota Tarakan, Nun
	Balikpapan, Kota Bontang
SELATAN	Bone, Barru, Soppeng, Kepulauan Selayar, Jeneponto, Sinjai, Bulukumba, T
	Enrekang, Sidenreng, Rappang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Kota Mak
UTARA	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Pulau Morotai, Halmahera Utara,
A SELATAN	Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Lahat, Ogan Komering Ilir, Musirawa
	Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang
TAN BARAT	Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak, Sekadau, M
BELITUNG	Bangka, Belitung, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitu
	Merangin, Sorolangun, Batang Hari, Muaro Jambi Tanjung Jabung Barat
TAN SELATAN	Tanah Laut, Banjar, Tabalong, Kota Banjarmasin, Barito Kuala, Tapin, Tanah
	Tengah, Hulu Sungai Utara

DESAKAN KOALISI ANTI-MAFI TAMBANG

1. *REKONSILIASI DAN VERIF TERHADAP SELURUH DA PENGOLAHAN*
2. *SANKSI KEPADA KABUPATEN YANG TIDAK MELAKSANA PENGAWASAN PENGOLA*
3. *PERBANYAK INSPEKTUR TAMBANG DI PEMDA*

5

Kinerja Pemenuhan Target Korsup Minerba

Komponen Pengawasan Penjualan

Obyek yang dinilai:

- Konsolidasi data laporan dan melaporkan ke pusat (50%)
- Ketersediaan dokumen pendukung laporan ke pusat (10%)
- Proses pengawasan atau verifikasi laporan perusahaan (20%)
- Penegakan atau tindak lanjut hasil verifikasi (20%)

PENGAWASAN PENJUALAN HASIL TAMBANG

Penyaksanakannya Pengawasan Dan Penerapan Hukum Terhadap Penjualan Hasil Usaha Pertambangan

Kinerja terburuk kembali terjadi di Jambi dengan kinerja yang hanya 0%, sementara kinerja terbaik dengan angka mencapai 30%.

Penjualan hasil tambang terjadi
na sekali tidak melakukan



Kinerja Pengawasan
Penjualan
30%
Kep.Riau

Kinerja Pengawasan
Penjualan
0%
Jambi

PENGAWASAN PENJUALAN HASIL TAMBANG

Dilaksanakannya Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Hasil Usaha Pertambangan

Provinsi	Total Kab.	Jumlah Kab.Ada IUP	Jumlah Kab. Lapor Pengawasan Penjualan	Jumlah Kab.Tidak Lapor Pengawasan Penjualan	Kinerja Pengawasan Penjualan (%)
KEPULAUAN RIAU	9	7	5	2	30,0
JAWA TENGAH	12	11	9	2	20,0
SULAWESI TENGAH	15	15	6	9	19,2
ANGKA BELITUNG	8	8	2	6	14,2
JAWA TENGGARA	15	13	4	9	11,4
SULAWESI TIMUR	15	12	3	9	10,0
CELEBES UTARA	10	9	3	6	8,8
SULAWESI SELATAN	14	8	1	7	6,1
SUMATERA SELATAN	16	13	2	11	5,3
SULAWESI BARAT	13	13	2	11	5,0
JAWA SELATAN	24	16	3	13	2,5
ACEH	12	8	0	8	0,0

Sumber: Data Pengawasan Penjualan dari Perusahaan Tambang di 12 provinsi

Dilaksanakannya Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Hasil Usaha Pertambangan

Provinsi	Kab.Tidak Lapor Per
RIAU	Natuna, Kepulauan Anambas
SITENGAH	Morowali, Poso, Banggai Kepulauan
TAN TENGAH	Kapuas Hulu Barito Utara Katingan Seruyan Sukamara , Gun
A BELITUNG	Bangka, Belitung, Bangka Selatan, Bangka Barat, Kota Pangkalpina
SITENGGARA	Konawe, Buton, Bombana, Kolaka Timur, Muna, Konawe Selatan,
TAN TIMUR	Kutai Kartanegara, Berau, Bulungan, Kota Samarinda, Kota Taraka Balikpapan, Kota Bontang
UTARA	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Pulau Morotai, Halmahera
TAN SELATAN	Tanah Laut Banjar, Tabalong, Kota Banjarmasin, Barito Kuala Tap Tengah, Hulu Sungai Utara
RA SELATAN	Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Lahat, Ogan Komering Ilir, M Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang
TAN BARAT	Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak, Sek
SI SELATAN	Bone, Barru, Soppeng, Kepulauan Selayar, Jeneponto, Sinjai, Bu Pinrang, Enrekang, Sidenreng, Rappang, Luwu, Tana Toraja, Luw
	Merangin, Sorolangun, Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung

DESAKAN KOALISI ANTI-MAFIA TAMBANG

1. REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP SELURUH DATA PENJUALAN
2. SANKSI KEPADA KABUPATEN YANG TIDAK MELAKSANAKAN PENGAWASAN PENJUALAN
3. PERBANYAK INSPEKTUR TAMBANG DI PEMDA

DESAKAN KOALISI ANTI-MAFIA TAMBANG

1. Cabut Seluruh IUP Non CNC.
2. Pastikan Kewajiban Keuangan Terpenuhi Setelah Dicabut.
3. Antisipasi Upaya Perlawanan Hukum Dari Pemegang Izin Yang Dicabut.
4. Keluarkan Daftar Black-list Pelaku Usaha Pertambangan (Pemilik, Pengurus, Dan Grup Usaha).
5. Aparat Penegak Hukum Menindak IUP Yang Beroperasi Di Dalam Kawasan Hutan Konservasi
6. Cabut Seluruh IUP Di Dalam Kawasan Hutan Konservasi
7. Verifikasi Data Produksi Untuk Menguji Kebenaran Kewajiban Keuangan
8. Tagih Seluruh Tunggalan Piutang Negara
9. Penghentian Sementara Produksi Sebelum Piutang Dibayarkan
10. Rekonsiliasi Dan Verifikasi Terhadap Seluruh Data Produksi, Pengolahan dan Penjualan
11. Sanksi Kepada Kabupaten Yang Tidak Melaksanakan Pengawasan Produksi, Pengolahan dan Penjualan
12. Perbanyak Inspektur Tambang Di Pemda
13. Melanjutkan proses Korsup Minerba
14. Memperluas cakupan Korsup Minerba agar meliputi juga KK dan PKP2B



**KOALISI
ANTI-MAFIA
TAMBANG**

KOALISI ANTI-MAFIA TAMBANG



Didukung oleh

